

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BPMPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2014.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan rogram dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja dan dilengkapi dengan pendanaan.

Terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Tahun 2014 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Kerja Tahun 2014. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2014 merupakan penjabaran dari RPJMD 2012-2017. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

## **1.2. Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja)**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2014 adalah

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.3. Sistematika Dokumen Rencana Kerja (Renja) BPMPD**

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Sistematika Dokumen SKPD, Maksud dan Tujuan

Bab II Keadaan umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gambaran Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPMPD, Sumber Daya BPMPD, Kinerja Pelayanan BPMPD.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPMPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Visi, Misi, arah dan Kebijakan SKPD, yang berisi uraian Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Strategi SKPD serta Tabel Rencana Program/Kegiatan Tahun 2014

Bab VI Penutup

### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014.

## **BAB II**

### **KEADAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN GAMBARAN PELAYANAN BPMPD**

#### **2.1. KEADAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

##### 2.1.1. Keadaan Geografis; Letak Daerah dan Luas Wilayah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (disingkat Babel) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil seperti Pulau Lepar, Pulau Pongok, Pulau Mendanau dan Pulau Selat Nasik, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkalpinang. Pemerintahan Provinsi ini disahkan pada tanggal 9 Februari 2001. Setelah dilantiknya Pj. Gubernur yakni H. Amur Muchasim, SH (mantan Sekjen Depdagri) yang menandai dimulainya aktivitas roda pemerintahan provinsi.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya adalah bagian dari Sumatera Selatan, namun menjadi provinsi sendiri bersama Banten dan Gorontalo pada tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 21 November 2000 yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran wilayah dari Provinsi Sumatera Selatan.

Secara geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104°50'-108°18' Bujur Timur dan 01°20'- 03°15' Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Disebelah Barat dengan Selat Bangka
- Disebelah Timur dengan Selat Karimata
- Disebelah Utara dengan Laut Natuna
- Disebelah Selatan dengan Laut Jawa

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari wilayah daratan dan wilayah laut dengan luas seluruhnya 81.752,14 km<sup>2</sup>, terdiri dari wilayah daratan kurang lebih 16.424,14 km<sup>2</sup> atau 20,10 persen yang meliputi 950 buah pulau baik pulau besar maupun kecil (Data Depdagri). Panjang pantai 1.200 km, dan luas perairan laut lebih kurang 65.301 km<sup>2</sup> atau 4 kali luas dari wilayah daratan yang diperkirakan 20 persen diantaranya merupakan perairan karang.

#### 2.1.2. Kondisi masyarakat

Corak masarakat Bangka Belitung dapat dibedakan dari segi sumber penghidupannya. Jenis-jenis mata pencaharian pokok di daerah ini adalah bertani, nelayan, buruh/karyawan tambang dan berdagang. Penggalian timah terdapat dimana-mana, di seluruh daratan pulau sampai di perairan lepas pantai, sehingga pekerjaan sebagai buruh bukan lagi merupakan masyarakat kota, tetapi juga dilakukan oleh penduduk di desa-desa dan di daerah pesisir. Tidak mengherankan jika ada karyawan tambang disamping pekerjaan mereka di Parit atau di Kapal Keruk, giat pula bercocok tanam ataupun menangkap ikan di luar jam kerjanya ataupun berdagang. Namun sejak adanya reorganisasi PT. Timah jumlah penduduk yang bekerja pada PT. Timah menjadi berkurang. Tanah Pulau Bangka Belitung sangat cocok untuk tanaman-tanaman perdagangan seperti Karet, Sahang (Lada), Kelapa, Kelapa Sawit dimana sebagian besar hasil tanaman ini diperdagangkan keluar daerah atau keluar negeri yang merupakan sumber penghidupan petani yang sangat berarti, sehingga mendorong mereka untuk meningkatkan usaha dalam bidang pertanian ini.

Keadaan ini menimbulkan perbedaan corak kehidupan sosial antara masyarakat petani tanaman-tanaman perdagangan ini dengan masyarakat petani ladang. Disamping itu kayanya perairan Pulau Bangka Belitung dengan berbagai jenis ikan selalu menarik kaum nelayan dari daerah-daerah lain, misalnya kaum nelayan suku Bugis. Pada mulanya mereka hanya sekedar datang pada waktu panen ikan, tetapi lama-kelamaan mereka kemudian menetap dan membaur dengan masyarakat serta membuat perkampungan sendiri. Karena bukan merupakan daerah dengan padang rumput yang baik, maka untuk kebutuhan daging bagi masyarakat, sapi potong didatangkan dari Madura, Bali, Sumbawa maupun Lombok dan Sumatera Selatan sendiri. Terlebih-lebih pada

waktu menghadapi hari-hari lebaran (Idul Fitri dan Idul Adha), maka kebutuhan akan daging sapi sangat terasa. Hal ini kemudian menimbulkan daya tarik bagi orang-orang Madura untuk menjadi pedagang dan peternak sapi di Bangka Belitung, disamping bercocok tanam sayur-sayuran dan palawija terutama jagung. Sedangkan usaha dagang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat Bangka Belitung keturunan Cina, tidak saja mereka berusaha dikota-kota, tapi juga mereka masuk ke desa-desa. Diberbagai pantai tertentu menetaplah orang-orang Cina ini yang melakukan penangkapan ikan dan beternak babi serta menanam sayur-sayuran. Keterbukaan masyarakat Bangka Belitung akan pendatang-pendatang telah menjadikan pulau ini bercorak heterogen. Di pulau ini terdapat berbagai jenis suku bangsa, membaaur dan berkembang. Disamping orang-orang dari suku Bugis, suku Madura, suku Butun, terdapat suku Jawa, Bali dari daratan Sumatera (Batak, Aceh, Palembang, Padang, dan lain-lain), Ambon dan sebagainya. Dalam masyarakat yang majemuk inilah, segala gerak langkah kehidupan berkisar pada usaha pencaharian nafkah. Setiap individu tampaknya selalu sibuk dan giat bekerja. Komplek perumahan karyawan yang dibangun disekitar pertambangan yang kadang jauh terpisah dari kampung-kampung, membawa corak atau bentuk kehidupan yang lain. Tetapi hal yang nampaknya seperti pemencilan ini ternyata tidak pernah membawa pengaruh atau menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena komunikasi selalu terpelihara dengan baik. Disamping membangun jalan-jalan, pihak perusahaan menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai, antara lain sekolah, listrik maupun telepon. Karena itu tidak mengherankan apabila di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan terdapat lampu listrik yang terang benderang. Namun demikian, dalam setiap lingkungan masyarakat yang bagaimanapun coraknya, suasana tradisional masih dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat Bangka Belitung, terutama di kampung-kampung. Semangat dan kegiatan gotong-royong masih terpelihara dan tumbuh dengan baik. Motto **“Serumpun Sebalai”** yang terdapat pada lambang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan makna yang mencerminkan segi kehidupan sosial masyarakat Bangka Belitung yang berdasarkan semangat gotong-royong itu.

Dari segala itu tertib sosial terus terpelihara dengan baik. Dan malahan dari kondisi-kondisi sosial ekonomi dan budaya seperti yang

diuraikan, telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk lebih memantapkan rasa persatuan dan kesatuan serta untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di segala kehidupan.

## **2.2. GAMBARAN PELAYANAN BPMPD**

### **2.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPMPD**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang dipimpin oleh seorang Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab dengan Kepala Badan.

Tugas Pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Fungsi Pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
- e. Pelaksanaan Urusan Kesekretariatan.

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan
  2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, membawahkan :
  1. Sub bidang pengembangan aparatur pemerintah desa/kelurahan
  2. Sub bidang administrasi pemerintah dan keuangan desa/kelurahan
- d. Bidang Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan, membawahkan :
  1. Sub bidang penataan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aparatur pemerintah desa/kelurahan
  2. Sub bidang pengembangan KPM dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
- e. Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan, membawahkan :
  1. Sub bidang social budaya masyarakat dan kesejahteraan keluarga
  2. Sub bidang ekonomi dan pemasaran
- f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
  1. Sub bidang pemanfaatan sumber Daya Alam
  2. Sub bidang apengembangan teknologi tepat guna desa / kelurahan
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 2.2.2. Sumber Daya Manusia BPMPD

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai 1 orang Kepala Badan, 1 orang sekretaris, 4 orang Kepala Bidang dan 11 orang Kepala sub bagian dan Kepala Sub Bidang, 9 orang staf golongan III, 7 orang staf golongan II, 19 orang tenaga honorer.

Aset yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah kendaraan operasional berupa 1 buah kantor, 3 unit mobil dinas dan 7 unit sepeda motor, selain itu juga memiliki kelengkapan kerja perlengkapan kantor berupa mobile kantor, AC, dan peralatan kantor lainnya.

#### 2.2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian urusan pemerintahan,



khususnya urusan pemerintahan daerah. Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang urusan pemerintahan daerah tersebut memperhatikan pencapaian program dan kegiatan dalam agenda pembangunan

Dalam agenda dan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa masih cukup banyak memerlukan penyelesaian lebih lanjut guna menjawab kebutuhan dan dinamika penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa yang harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sembilan bidang pembangunan yang termuat dalam RPJPN Tahun 2005-2025, meliputi: (1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (2) Bidang Ekonomi; (3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Bidang Sarana dan Prasarana; (5) Politik; (6) Pertahanan dan Keamanan; (7) Hukum dan Aparatur; (8) Bidang Wilayah dan Tataruang; (9) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kementerian Dalam Negeri sesuai konteks peran dan kepentingan nasional, memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi kepada kesembilan bidang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana termuat dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 72 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, prioritas kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa termasuk dalam Bidang Wilayah dan Tata Ruang.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Aspek Penataan dan Penguatan Otonomi Desa

Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa. Rendahnya pemahaman terhadap jati diri desa yang bersumber dari keaslian asal-usul dan adat-istiadat setempat untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa, Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peraturan daerah yang mengatur hal itu belum ada karena belum adanya aturan hukum yang memadai yang menjadi dasar pembagian kewenangan tersebut. Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat

pendidikan formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal. Belum semua desa memiliki kantor desa yang memadai sebagai sarana dan prasarana utama dalam menyelenggarakan pemerintahan desa; masih sedikitnya desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa.

## 2) Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Ketidakterdayaan masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang ada semua bisa dikatakan tidak aktif, pada Tahun 2011 dilaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas UED-SP ke BUMDesa sebanyak 2 Desa yaitu Desa Pagarawan Kecamatan Merawang dan Desa Labu Kecamatan Puding Besar melalui Dana Dekonsentrasi. Target capaian pendataan UED-SP sampai dengan tahun 2017 berjumlah 300 unit.

Masalah lainnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal kepada masyarakat miskin juga masih kurang serta perlindungan dan pengakuan budaya lokal (masyarakat hukum adat), penyandang masalah kesejahteraan sosial (HIV/AIDS, Lansia, Penyandang cacat, Komunitas Adat Terpencil), Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan terhadap Tenaga Kerja Pedesaan. Selain itu, penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas juga masih sangat terbatas.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan BPMPD

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah minimnya anggaran untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sehingga pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu juga kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kinerja para pejabat yang ada seperti kendaraan operasional yang masih minim, dan juga kurangnya sumberdaya manusia yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga ada beberapa tupoksi yang hanya berjalan di tempat.

##### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar tinggal di pedesaan, pada umumnya hidup dalam keterbatasan, kemiskinan dan ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat termasuk masyarakat miskin, disamping disebabkan masalah ekonomi juga disebabkan kurangnya akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan serta peningkatan kemampuan dan keterampilan termasuk informasi. Adapun berbagai tantangan ke depan yang perlu diantisipasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pencapaian program prioritas :

- a. Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat relative terbatas.
- b. Kinerja Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan masih rendah dalam mendorong peran aktif masyarakat mengelola program-program pembangunan dalam rangka mewujudkan ketahanan masyarakat, termasuk masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia di pedesaan, seperti Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kader PKK dan Kader Posyandu.

- c. Kecendrungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga adat sebagai penegak system nilai social budaya dalam kehidupan masyarakat lokal, sehingga memerlukan upaya pemantapan nilai-nilai social budaya gotong royong sebagai pedoman sikap dan prilaku masyarakat dalam kehidupan bersama.
- d. Semakin menurunnya tingkat kesejahteraan social masyarakat dengan berkembangnya berbagai jenis penyakit menular (Polio, TB Paru, Malaria), serta kasus HIV/Aids dan masalah social kemasyarakatan lainnya, dapat berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya pemenuhan hak-hak dasar penduduk, seperti kesehatan dan pendidikan serta peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- e. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat sehingga memerlukan upaya penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usaha-usaha desa termasuk lembaga keuangan mikro masyarakat di perdesaan dalam penyediaan permodalan.
- f. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal.
- g. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna, sehingga tidak tercipta peningkatan produktivitas kerja dalam peningkatan nilai tambah produkhasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Faktor-faktor pendorong pencapaian visi dan misi adalah adanya peraturan perundangan yang memberikan kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan serta adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka pemerintah Daerah memiliki diskresi atau keleluasaan kewenangan untuk mengatut dan mengurus kepentingan masyarakat termasuk penetapan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

- a. Kebijakan pemerintah dalam kerangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan berbagai kemajuan.
- b. Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus meningkat dari tahun-ke tahun.
- c. Masih relatif besarnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- d. Masih Rendahnya Kualitas SDM Apartur Desa dalam pelayanan terhadap masyarakat
- e. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan termasuk masyarakat miskin.
- f. Pluralisnya tradisi, adat istiadat dan budaya yang ada di Bangka Belitung.
- g. Adanya penataan dan pemantapan system pemerintahan daerah dan pemerintahan desa melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan PP 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

**BAB IV**  
**VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, RENCANA PROGRAM**  
**DAN KEGIATAN SKPD**

Dalam rangka penugasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas: merumuskan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan desa
2. Fungsi :
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan pemerintah provinsi di bidang pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pelatihan masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, Sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pelatihan masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat serta sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
  - c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan dan pelatihan masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, Sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
  - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
  - e. Pelaksanaan administrasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

**4.1. Visi**

Berdasarkan peran dan mandat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dirumuskan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai cerminan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan

kesinambungan upaya pemberdayaan masyarakat, penataan dan penguatan otonomi desa, serta penguataan pemerintahan desa serta pada masa-masa sebelumnya.

Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2012-2017 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam lima tahun ke depan, yaitu: **“terwujudnya otonomi desa dan keberdayaan masyarakat yang partisipatif”**

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk menjadi terdepan dalam melanjutkan perjalanan organisasi sebagai motor penggerak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus disinergikan dengan elemen penggerak lainnya dalam suatu kesisteman yang utuh.

- a. Otonomi desa, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan Pemantapan Kerangka Aturan/Regulasi; Pemantapan Kelembagaan Pemerintahan Desa; Pemantapan Pengelolaan Keuangan Desa; Pemantapan Administrasi Pemerintahan Desa; Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa; dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan desa kearah yang lebih demokratis.
- b. Keberdayaan masyarakat, merupakan upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan politik, sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan.
- c. Partisipatif masyarakat, merupakan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

#### **4.2. Misi**

Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didalam Renstra

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2012-2017, didasarkan pada isu-isu strategis lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk lima tahun ke depan, yang merupakan penjabaran dari visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya:

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
2. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta Memantapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);
3. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat, mengembangkan usaha ekonomi masyarakat;
4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.

#### **4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

Mengacu pada visi, misi, agenda pokok dan Prioritas Pembangunan Nasional serta Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014, Kementerian Dalam Negeri menetapkan dan melaksanakan 5 (lima) **Prioritas Nasional** (PN) yang juga merupakan bagian penugasan yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Penanggulangan Kemiskinan;
3. Infrastruktur;
4. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
5. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik;

Mengacu pada Permendagri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2010-2014 serta sesuai dengan lingkup tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri, dengan prinsip-prinsip:

2. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yaitu dengan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumnya dengan



rencana selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;

4. Tata pemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik (*good governance*) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

#### 4.3.1. Arah Kebijakan dan Program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Berdasarkan prioritas nasional serta arah arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri tersebut lingkup yang menjadi tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yaitu:

1. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan, pengelolaan keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaan desa;
2. Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif serta memantapkan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan dan pengembangan kebijakan daerah;
3. Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan dukungan daerah tertinggal dan pasca bencana.
4. Mendorong peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera;
5. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro perdesaan dan usaha-usaha desa, serta pengembangan pasar desa;

7. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

8. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan prioritas nasional tahun 2010-2014, dan berdasarkan aturan restrukturisasi program dan kegiatan bahwa setiap Eselon III harus memiliki program, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan 7 (tujuh) program yaitu: Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Program Penguatan Ekonomi Lokal, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Program Penataan Daerah Otonomi Baru, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan serta keberdayaan masyarakat, melalui penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan; kelembagaan pelatihan masyarakat; penanggulangan kemiskinan; pembinaan sosial budaya lokal; pengembangan usaha ekonomi masyarakat; serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Indikator kinerja program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam memfasilitasi proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis dan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, diukur dari:

1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan aset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD;
2. Jumlah Dokumen Perda tentang Desa yang diselesaikan;
3. Jumlah Kabupaten yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan di desa;
4. Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa;
5. Prosentase lembaga keuangan mikro pedesaan/Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang berfungsi;

6. Jumlah Penyediaan sarana dan Prasarana Pemasaran hasil produksi masyarakat desa;
7. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi.
8. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan budaya melalui pelestarian Adat dan Budaya Bangka Belitung;
9. Jumlah fasilitasi dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu;
10. Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) memanfaatkan Tanaman Jarak Pagar (*Jatropha Curcas Lin*); serta

#### 4.4. Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Berikut disajikan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014:

**TABEL.4.4**  
**MATRIK TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN**  
**RENJA TAHUN 2014**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

(Dalam Juta Rupiah)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2014	
				(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan Otonomi Desa dan Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	1. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset desa serta kelurahan melalui bimtek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa. 2. Jumlah dokumen desa tentang yang diselesaikan. 3. Jumlah aparatur pemerintahan desa yang ditingkatkan kapasitas SDM nya melalui Bimtek BPD, Bimtek Penyusunan perdes, bimtek tentang peraturan maupun undang-undang yang berkaitan dengan desa. 4. Jumlah LKP kades, LPP desa, RPJMdesa yang sesuai standar dan ketentuan. 5. Jumlah papan monografi desa yang valid dan lengkap (Up to date).	1 Paket	2.690

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2014	
				(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah desa yang difasilitasi dalam penataan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan.</li> <li>2. Jumlah desa yang memiliki profil desa sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.</li> <li>3. Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif.</li> <li>4. Jumlah KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif.</li> <li>5. Jumlah pelatihan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi.</li> <li>6. Jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam membangun desa/kelurahan.</li> </ol>	Desa/ Kel.	1.350
		Meningkatnya kegiatan Ekonomi Produktif Masyarakat Desa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase lembaga keuangan mikro perdesaan /Bumdes.</li> <li>2. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana hasil produksi masyarakat.</li> <li>3. Jumlah desa yang difasilitasi untuk cadangan pangan pemerintah desa.</li> <li>4. Jumlah desa yang difasilitasi tentang pemberdayaan ekonomi dan usaha ekonomi bagi masyarakat miskin.</li> <li>5. Jumlah pasar desa yang difasilitasi penyerahan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.</li> <li>6. Jumlah RTS-PM yang difasilitasi dalam bentuk subsidi Raskin.</li> </ol>	7 Kab/ Kota	13.100
		Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat & Sosial Budaya Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah fasilitasi dalam pembinaan adat istiadat dan budaya melalui pelestarian adat istiadat dan budaya daerah.</li> <li>2. Jumlah Posyandu yang aktif di desa dan kelurahan.</li> <li>3. Jumlah Kab/kota yang mengaktifkan sistem informasi Posyandu.</li> <li>4. Jumlah masyarakat yang ikut dalam menggalakan budaya gotong royong.</li> <li>5. Jumlah siswa kurang mampu</li> </ol>	7 Kab/ Kota	1.725

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2014	
				(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
			yang difasilitasi pemberian makanan tambahan melalui PMT-AS. 6. Jumlah Pokja adat yang terbentuk dan berfungsi.		
		Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya alam & Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.	1. Jumlah Posyantek yang berfungsi 2. Jumlah Kabupaten/ kota yang berpartisipasi dalam Lomba TTG. 3. Jumlah Kabupaten Kota yang berpartisipasi dalam gelar TTG Nasional. 4. Jumlah Desa/ Kelurahan pesisir yang difasilitasi pendataan desa/kel pesisir dan Bimtek Inventarisir desa/ kelurahan pesisir. 5. Jumlah lembaga penelitian dan pengurus tinggi yang ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan SDA dengan mendayagunakan TTG.	7 Kab/ Kota	1.994

**TABEL .4.5**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PENDANAAN INDIKATIF (Dalam Jutaan Rupiah)	
				1	2
1	2	3	4	5	
				Capaian Program/ Kegiatan	Rp
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>24.494</b>
	<b>Lingkungan internal dan eksternal SKPD</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>2.045</b>
	Institusi pemerintah dan masyarakat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengiriman paket dan surat menyurat, perangko, materai.	525 surat	80
	kantor BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran listrik dan komunikasi serta langganan internet	12 Bln	150
	Pejabat Eselon II,III dan IV BPMPD Provins Kep.Bangka Bellitung	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Bbm dan Pelumas	1000 Liter	400
	Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya honorarium bagi pengelola keuangan	12 Bln	60
	kantor BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa untuk kebersihan kantor	12 Bln	250
	kantor BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa untuk pemeliharaan dan perlengkapan kantor	12 Bln	80
	Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	12 Bln	120
	Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	100
	kantor BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lampu, kabel listrik, instalasi listrik	12 Bln	25
	Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Koran, majalah	5040 koran	40
	Kegiatan, rapat, jamuan terhadap tamu	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Makanan dan minuman	12 Bln	40
	internal dan eksternal SKPD	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah	12 Bln	500
	internal dan eksternal SKPD	Survey Dan Pengumpulan Data	Tersedianya data desa/kelurahan	12 Bln	200

	<b>Kantor BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>430</b>
	kantor BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	AC, Komputer, Genset, Laptop, scanner, UPS	1 Pkt	100
	Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Horden ruangan	1 Pkt	100
	Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengadaan Meubelair	Meja kerja Eselon III,IV, dan staf, Kursi Kerja Eselon III, IV dan staf, Sofa ruangan bidang	1 Pkt	100
	Kantor BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 Pkt	100
	Pegawai BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	AC, Alat Studio, Jaringan air,Laptop,Komputer PC ,Perbaikan Listrik dan Telepon	1 Pkt	30
	<b>Lingkungan internal dan eksternal SKPD</b>	<b>Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>	<b>Tercapainya target kinerja anggaran setiap tahun</b>		<b>1.060</b>
	Evaluasi Kegiatan Bidang-bidang BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Monitoring Dan Evaluasi Program	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap bidang	12 Bln	80
	% keberhasilan BPMPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	% capaian kinerja terhadap indikator kegiatan dalam 1 tahun anggaran	2 Lap	50
	Masyarakat penerima Program PNPM-MPd	Gelar Karya PNPM Mandiri Perdesaan	Meningkatkan pemahaman program dan sinergitas lintas pelaku dalam rangka pengentasan kemiskinan	1 Lokasi	150
	Pelaku PNPM-MPd di 3 Kabupaten di Provinsi Kep.Bangka Belitung	Seleksi si Kompak Award	Meningkatnya motivasi pelaku PNPM-MPd di Prov.Kep.Bangka Belitung	3 Kab	150
	Pelaku PNPM-MPd di 3 Kabupaten di Provinsi Kep,Bangka Belitung	Pendampingan Hukum kepada pelaku PNPM-MPd	Terbinanya dan terdampingi pelaku PNPM-MPd yang bersalah	3 Kab	150
	Masyarakat penerima Program PNPM-MPd	PAP PNPM-MPd ( Kegiatan Pembinaan dan Monev PNPM-MPd)	Mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat	3 Kab	200
	Masyarakat	Operasionalisasi Unit Pengaduan Masyarakat	Menampung pengaduan dari masyarakat	12 Bulan	150
	<b>Lingkungan internal dan eksternal SKPD</b>	<b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel yang mengaplikasikannya</b>		<b>2.690</b>
	Aparatur desa se- Provinsi Kep.Bangka Belitung	Bimtek Penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Rancangan Peraturan Desa/ Kelurahan	Meningkatkan Pengetahuan dan pengelolaan administrasi Aparatur Desa	100 Org	300

	Meningkatkan Pengetahuan dan pengelolaan administrasi Aparatur Desa	Sosialisasi UU Desa	Meningkatkan Pengetahuan dan pengelolaan administrasi Aparatur Desa	100 Org	200
	Aparatur desa/ Kelurahan se- Provinsi Kep.Bangka Belitung	Bimtek Aplikasi Pendataan Desa/ Kelurahan	Meningkatkan Pengetahuan Aparatur Desa dalam pengelolaan Data	100 Org	300
	100 orang Anggota BPD	Bimtek Manajemen Pemerintah Desa bagi Pengurus BPD tentang Manajemen	Meningkatkan pengetahuan anggota BPD dalam Urusan penyelenggaraan pemerintah yang baik	100 Org	300
	40 Desa/ Kelurahan di 7 Kabupaten/kota	Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan Mandiri Percontohan	Terlaksananya koordinasi dan monitoring bantuan keuangan kepada desa/ kel Mandiri Percontohan	40 Desa	100
	Desa/ Kelurahan Se- Provinsi kepulauan Bangka Belitung	Pembinaan Monitoring Dan Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan	Terpantaunya dana Bantuan Pemerintah Provinsi Kep.Bangka Belitung	7 kab/kota	175
	Kepala Desa/Lurah	Temu karya Kepala Desa dan Lurah Se- Prov.Kep.Bangka Belitung	Meningkatkan pengetahuan aparatur desa dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam	6 kab	200
	<b>Lingkungan internal dan eksternal SKPD</b>	<b>Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>Persentase meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berperan aktif serta berpartisipasi dalam proses pembangunan</b>		<b>1.350</b>
	Lembaga Kemasyarakatan se - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelatihan Manajemen Bagi lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan se Provinsi Kep. Bangka Belitung	Peningkatan peran aktif Lembaga kemasyarakatan	45 org	150
	Desa/ Kelurahan Se- Provinsi kepulauan Bangka Belitung	Penilaian Partisipasi Masyarakat Dalam membangun desa dan kelurahan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membangun desa / kelurahan	6 Desa, 6 kel	285
	Kelompok Kerja Profil Desa/ Kelurahan	Fasilitasi dan Monitoring Penyusunan Profil Desa/ Kelurahan	Tersedianya Data Profil Desa/ Kelurahan yang valid	35 Org	200
	Terbentuknya KPM	Pelatihan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Peran Aktif Aparatur Desa/Kelurahan	45 Org	200
	Aparatur Pemdes	Pelatihan penyusunan RPJMdes bagi Aparatur Pemdes	Tersedianya dokumen RPJMdes 5 Tahun	36 Org	175
	Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa/Kelurahan	Temu karya Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) se-Prov.Kep.Babel	Terciptanya keharmonisan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) se- Prov.Kep.Babel	42 Org	130



	<b>Lingkungan internal dan eksternal SKPD</b>	<b>Program Pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa</b>	<b>Tercapainya pengembangan dan pemberdayaan sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa</b>		<b>1.725</b>
	Anak sekolah Dasar Se-provinsi kep.Bangka Belitung	Bantuan Monitoring serta Evaluasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) Provinsi Kep.Bangka Belitung	Mengkoordinir kegiatan program makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS)	7 Kab/Kota	1.000
	Kesehatan Masyarakat desa /kelurahan	Pembinaan Pokjnal Posyandu	Meningkatkan koordinasi dan Pembinaan Pokjnal Posyandu	7 Kab/Kota	150
	Desa/ Kelurahan Se Provinsi kepulauan Bangka Belitung	Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Bulan Bakti Goton Royong Masyarakat	Menumbuhkan budaya gotong royong di masyarakat	7 Kab/Kota	250
	Desa Se Provinsi kepulauan Bangka Belitung	Fasilitasi dan pendampingan penetapan kawasan perdesaan berbasis masyarakat	Penataan ruang partisipatif, penetapan dan pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa serta penguatan kapasitas masyarakat,kelembagaan dan kemitraan	6 Kab	70
	35 Orang	Pelatihan Ketrampilan dan Pengelolaan Usaha Ekonomi Keluarga di Perdesaan	Terampilnya masyarakat dalam mengelola Usaha	35 Org	100
	Pasar Desa yang ada se-provinsi Kep.Bangka Belitung	Fasilitasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan pasar Desa	Berlakunya pasar desa secara Optimal	62 Org	130
	Masyarakat	Ekspo ekonomi kreatif	Terlaksananya promosi hasil usaha ekonomi kreatif masyarakat	1 Lokasi	25
	PKK di Kab/Kota	Peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK)	Meningkatnya kinerja kelompok kerja (Pokja) PKK	7 Kab/Kota	974
	<b>Lingkungan internal dan eksternal SKPD</b>	<b>Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG</b>	<b>Persentase SDA yang dikelola dan Posyantek yang berfungsi</b>		<b>1.994</b>
	7 Kabupaten /Kota	Pelatihan Ketrampilan Dasar Fasilitasi dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Pengelolaan Prasarana	Terlaksananya penilaian kelompok sarana dan Prasarana	7 Kab/Kota	175
	7 Kabupaten /Kota	Inventarisasi Database Potensi Desa/kelurahan Daerah pesisir Bimtek Aplikasi Pendataan Desa/ Kelurahan pesisir	Terlaksananya pendataan Data base daerah pesisir	7 Kab/Kota	184
	Masyarakat Indonesia	Gelar TTG Tingkat Nasional	Pengenalan Jenis TTG Prov Kep.Babel	1 Lokasi	325
	50 Persen	Peningkatan Motivasi Masyarakat melalui Lomba TTG Tingkat Provinsi	Meningkatkan Daya saing Produk daerah	7 Kab/Kota	225

	Pengurus Posyantek di Kecamatan	Pelatihan Pengurus Posyantek	Meningkatkan pengetahuan sikap dan ketrampilan	7 Kab/Kota	225
	7 Kabupaten /Kota	Operasionalisasi Posyantekdes Percontohan	Terlaksananya operasionalisasi Posyantek di tingkat Kecamatan	7 Kab/Kota	175
	Pengurus Posyantek yang ada di 7 Kabupaten/kota	Peningkatan partisipasi kelompok masyarakat melalui lomba posyantek tingkat Provinsi	Terlaksananya motivasi kepada pengurus posyantek	7 Kab/Kota	135
	Daerah pesisir di 7 Kabupaten/kota	Pelatihan pengelolaan sumber daya alam daerah pesisir	Terlaksananya sumber pendapatan masyarakat daerah pesisir	7 Kab/Kota	200
	Hasil lomba TTG Tahun 2013 s.d 2017	Pembuatan katalog TTG	Terlaksananya pembuatan rangkuman/kumpulan alat-alat TTG selama 5 Tahun	7 Kab/Kota	150
	Masyarakat	Fasilitasi pengembangan dan penerapan TTG Desa/Kelurahan	Terlaksananya pemanfaatan TTG bagi masyarakat	7 Kab/Kota	200
	<b>Masyarakat miskin</b>	<b>Program Raskintis</b>	<b>Persentase RTM yang mendapat RASKINTIS</b>		<b>13.100</b>
	Desa/ Kelurahan Se Provinsi kepulauan Bangka Belitung	Rakor dan Monev Bantuan Beras Bagi keluarga Miskin	Terlaksananya Bantuan sosial Subsidi Raskin	7 Kab/Kota	100
	Desa/ Kelurahan Se Provinsi kepulauan Bangka Belitung	Pemberian Bantuan Sosial Sisa Subsidi Beras kepada Keluarga Miskin secara Gratis	Menurunnya beban pengeluaran masyarakat miskin	7 Kab/Kota	13.000
<b>TOTAL BELANJA</b>					<b>24.494</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasikan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014.

Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk mencapai sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 yang telah ditetapkan, agar setiap bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melaksanakan program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsinya.